

RINGKASAN

PAD di Kabupaten Banyumas menunjukkan kontribusi yang relatif rendah terhadap total pendapatan daerah, yakni hanya sebesar 24% pada tahun 2024. Dalam sepuluh tahun terakhir, tren kinerja PAD mengalami penurunan, yang mengindikasikan bahwa potensi fiskal daerah belum tergarap secara optimal. Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel makroekonomi seperti jumlah penduduk, inflasi, dan TPT terhadap PAD, serta mengidentifikasi jenis pajak dan retribusi daerah yang berpotensi mendorong peningkatan PAD.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda terhadap data sekunder tahun 2007–2024 (dengan pengecualian tahun 2016), serta metode Tipologi Klassen untuk memetakan klasifikasi potensi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Banyumas tahun 2024. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik, laporan realisasi anggaran, dan dokumen regulasi pemerintah daerah yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, variabel jumlah penduduk, inflasi, dan TPT berpengaruh signifikan terhadap PAD. Secara parsial, jumlah penduduk dan TPT memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD, sementara inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Berdasarkan hasil pemetaan Tipologi Klassen, BPHTB dikategorikan sebagai sumber prima, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, dan PBB-P2 tergolong sumber potensial, sedangkan Pajak Reklame dan Pajak MBLB masuk dalam sumber berkembang. Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Parkir termasuk kategori terbelakang. Sementara itu, dari sisi retribusi daerah, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berada dalam kuadran prima. Retribusi Persampahan, Penyedotan Kakus, Pasar Grosir dan Pertokoan, Penjualan Produksi Usaha Daerah, serta Pelayanan Kesehatan, berada dalam kategori berkembang. Retribusi Parkir (Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus), Terminal, Pengujian Kendaraan Bermotor, Rumah Potong Hewan, dan Tempat Rekreasi dan Olahraga, termasuk ke dalam kategori terbelakang.

Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya perumusan strategi pengelolaan pajak dan retribusi yang lebih terarah, termasuk peningkatan intensifikasi, ekstensifikasi, serta digitalisasi sistem pemungutan. Selain itu, respons yang adaptif terhadap dinamika makro ekonomi juga menjadi kunci dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dan memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Banyumas secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah Penduduk, Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tipologi Klassen.

SUMMARY

PAD in Banyumas Regency shows a relatively low contribution to total regional income, which is only 24% in 2024. In the last ten years, the trend of PAD performance has decreased, indicating that the regional fiscal potential has not been optimally utilized. This shows that there is still a high dependence on central transfer funds. Therefore, this study aims to analyse the influence of macroeconomic variables such as population, inflation, and TPT on PAD, as well as to identify the types of regional taxes and levies that have the potential to increase PAD.

This study uses a quantitative descriptive approach with a multiple linear regression analysis method on secondary data for 2007–2024 (with the exception of 2016), as well as the Klassen Typology method to map the classification of potential regional taxes and levies in Banyumas Regency in 2024. Data were obtained from the Central Statistics Agency, budget realization reports, and relevant local government regulatory documents.

The results of the study show that simultaneously, the variables of population, inflation, and TPT have a significant effect on PAD. Partially, population and TPT have a significant effect on PAD, while inflation does not have a significant effect on PAD. Based on the results of the Klassen Typology mapping, BPHTB is categorized as a prime source, Restaurant Tax, Street Lighting Tax, and PBB-P2 are classified as potential sources, while Advertising Tax and MBLB Tax are included in developing sources. Hotel Tax, Entertainment Tax, Groundwater Tax, and Parking Tax are included in the underdeveloped category. Meanwhile, in terms of regional levies, Market Service Levy and Regional Asset Use Levy are in the prime quadrant. Garbage Levy, Toilet Suction, Wholesale Markets and Shops, Sales of Regional Business Production, and Health Services are in the developing category. Parking Levy (Public Roadside and Special Places), Terminals, Motor Vehicle Testing, Slaughterhouses, and Recreation and Sports Places are included in the underdeveloped category.

The implications of this study emphasize the importance of formulating a more targeted tax and levy management strategy, including increasing intensification, extensification, and digitalization of the collection system. In addition, an adaptive response to the dynamics of macroeconomic variables is also key to optimizing regional income and strengthening the fiscal independence of Banyumas Regency in a sustainable manner.

Keywords: Local Own-Source Revenue (PAD), Total Population, Inflation, Open Unemployment Rate (TPT), Klassen Typology.